

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan Pengelolaan Aset Tetap Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur belum sepenuhnya perpatokan pada Permendagri No.17 Tahun 2007. Sehingga aset tetap belum dikelola dengan baik seperti :

- a. Dinas PPKAD sudah melakukan penggunaan Barang Milk Daerah tetapi masih belum terlaksana secara efektif, karna penggunaan yang dilakukan bukan untuk kepentingan TUPOKSI contohnya Kendaraan Dinas dipakai untuk urusan pribadi.
- b. Penatausahaan dalam hal pelaporan aset Dinas PPKAD, tidak terapkan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) karena teknologi shofwer atau aplikasi belum ada.
- c. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur sebagian besar sudah dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Namun aset tanah masih ada yang bermasalah digugat pemilik dan sedang dalam proses hukum.
- d. Pengamanan belum menitik beratkan penertiban/pengamanan secara fisik dan adminisratif sehingga Barang Milik Daerah Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur belum digunakan secara optimal seperti aset

tanah sudah dimiliki oleh Dinas PPKAD, tetapi dokumen kepemilikannya masih dalam proses pembuatan.

- e. Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur belum memakai penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset. Sehingga Tanah dan Bangunan belum ada yang dapat mengukur nilai wajar.
- f. Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur penghapusan baru dilakukan pada Kendaraan Dinas tetapi masih tercatat dalam daftar inventaris.
- g. Pemindahtanganan Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur pelepasan hak atas Tanah dan Bangunan tidak melalui proses tender tetapi pelelangannya melalui sertifikat, tanah diatas satu hektar dilakukan oleh panitia pelelangan sedangkan dibawah satu hektar melalui berita acara.
- h. Dalam pengawasan Dinas PPKAD belum melakukan dengan baik karena setiap kali pengadaan Barang Milik Daerah masih ada barang yang belum terinventarisir.
- i. Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur bagi pegawai yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah menghasilkan penerimaan daerah tidak mendapatkan atau diberikan insentif.

6.2. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Dinas PPKAD dalam penggunaan Barang Milik Daerah harus berpatokan pada Permendagri No. 17 tahun 2007 agar penggunaan terlaksana secara efektif sesuai TUPOKSI.
- b. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) perlu diterapkan untuk meningkatkan kinerja Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur dalam pelaporan Barang Milik Daerah.
- c. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur harus dipergunakan sesuai dengan TUPOKSI dan dokumen kepemilikan lengkap agar tidak digugat oleh pemilik.
- d. Pengamanan Barang Milik Daerah harus diperhatikan baik fisik maupun administrasi sehingga dokumen kepemilikannya ada.
- e. Sebaiknya Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur perlu meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan/pelatihan untuk menambah wawasan khusus penilaian aset.
- f. Barang Milik Daerah Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur harus dihapuskan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah.
- g. Pemindahtanganan Dinas PPKAD harus sesuai dengan Permendagri No.17 tahun 2007.
- h. Pengawasan di Dinas PPKAD dilakukan sesuai peraturan Perundang-undangan agar semua barang terinventarisir dengan baik.

- i. Pembiayaan bagi pegawai yang menghasilkan pendapatan harus diberikan insentif agar kinerja pegawai semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2010. *Pengelolaan keuangan dan aset daerah*. FOKUSMEDIA, Bandung.
- Djarwanto, 2004. *Pokok – pokok analisis laporan keuangan edisi 2*, BPFE, Yogyakarta.
- FASB (*Financial Accounting Standard Board*).
- Hilmah Fairoza, *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA kota Padang*, Skripsi padang; Universitas Negri Padang, 2013
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2011.
- Laporan Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP Stim YKPn, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta
- Mursyidi, 2009. *Akuntansi pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *standar Akuntansi pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010.
- Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan PP No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.